

**BAB II.**  
**ORIENTASI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) KOREA SELATAN**  
**DI INDONESIA DAN ASEAN**

**2.1. Tinjauan Umum Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Korea Selatan**

Pada awal pembangunan ekonominya, Korea Selatan dikategorikan sebagai negara yang mengalami industrialisasi yang terlambat (*late-industrializing*).<sup>30</sup> Terminologi ini digunakan mengingat negara tersebut memulai industrialisasinya sekitar seratus tahun lebih lama dibandingkan dengan negara-negara industri barat, khususnya Inggris. Kondisi *late-industrialization* yang dialami Korea Selatan mempunyai konsekuensi penting terutama jika dikaitkan dengan masalah teknologi dan kondisi ekonomi internasional.

Dalam masalah teknologi, Korea Selatan mengalami transformasi struktur produksi dan peningkatan pendapatan perkapitanya dengan menggunakan teknologi pinjaman dari negara-negara industri barat yang pada masa itu relatif lebih maju. Kenyataan inilah yang membedakan industrialisasi negara-negara industri barat dengan Korea Selatan. Inggris sebagai negara yang mengalami Revolusi Industri melakukan industrialisasinya berdasarkan penemuan (*invention*). Kemudian Jerman dan Amerika Serikat melakukan industrialisasi berdasarkan pengembangan (*inovation*). Sementara itu negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan melakukan proses industrialisasi ini dengan berdasarkan proses belajar atau mempelajari teknologi (*basis of learning*).<sup>31</sup>

Dari segi kondisi ekonomi internasional, maka negara *late-industrializing* mengalami hambatan-hambatan yang berbeda dibanding dengan negara-negara industri maju. Diantaranya adalah pasar yang sudah dikuasai oleh negara-negara

---

<sup>30</sup> Alice H. Amsden, *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*, New York, Oxford University Press, 1989, hal. 1-23. Lihat pula tulisan Hero U. Kuntjoro-Jakti, "Dampak Pembangunan di Jepang, Korea Selatan dan Indonesia: Tinjauan Ekonomi Politik Internasional", dalam *Jurnal Ilmu Politik 1-4*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 71-82.

<sup>31</sup> Amsden, *ibid.*, hal 4.

yang sudah memulai pembangunannya lebih awal, teknologi yang tertinggal, modal yang kurang dan tipisnya lapisan kelompok *entrepreneur*. Kenyataan tersebut melahirkan pola industrialisasi yang berbeda dibanding negara-negara barat. Perbedaan yang mencolok terletak pada peran negara dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan atau melakukan campur tangan terhadap pasar.

Di Korea Selatan misalnya, peran negara terlihat amat kuat dalam pembentukan kebijakan-kebijakan ekonominya. Pada masa Park Chung Hee (1961-1979) misalnya, campur tangan pemerintah dalam ekonomi terlihat dengan pemberian peran utama kepada barisan wiraswasta yang dipandang mempunyai kemampuan finansial yang kuat dan jalur pengembangan yang baik. Kelompok inilah yang selanjutnya berkembang menjadi konglomerat Korea atau yang lebih dikenal dengan istilah *Chaebol*.<sup>32</sup> Di Jepang, peran pemerintah dalam pembangunan industri tampak jelas dengan dominannya peran MITI (*Ministry of International Trade and Industry*) yang kerap menjadi aktor kunci dalam memadukan kepentingan pihak swasta (pengusaha) dengan kebijakan industri nasional negara tersebut.<sup>33</sup>

Peran negara dalam pelaksanaan pembangunan terasa amat menonjol terutama setelah Korea Selatan berada di bawah pimpinan junta militer Park Chung Hee (1961-1979) yang pada 1963 memperkenalkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (*First Five Year Plan*) yang direvisi. Inti utama dari rencana ini adalah komitmen yang kuat kepada industrialisasi dan peran dominan negara dalam proses tersebut.

Dibawah pimpinan Park, Korea Selatan mengadakan beberapa langkah penting yakni pembukaan hubungan diplomatik dengan Jepang untuk mengundang arus investasi asing dan tunduk kepada tekanan Amerika Serikat dan kelompok teknokrat Korea Selatan untuk menggalakkan ekspor terutama manufaktur.

---

<sup>32</sup> Richard M. Steers, Too Keun Shin dan Gerad R. Ungson (ed), *The Chaebol: Korea's new Industrial Might*, New York. Harper Business, 1989. hal. 20-24.

<sup>33</sup> Alan Rix. *Japan's Economic Aid: Policy Making and Politics*, London, Croom Helm, 1980, hal. 83-101.

Pada periode ini, Korea Selatan berhasil membangun industrinya dan menekankan orientasi ekspor pada pelaksanaan industrialisasinya. Keberhasilan ekspor Korea Selatan di bawah pemerintahan Park pada dasawarsa 1960-an adalah besarnya ekspor industri ringan seperti tekstil, pakaian jadi dan barang-barang antara. Tekstil dan pakaian jadi merupakan ekspor utama yang jumlahnya pernah mencapai 36% dari seluruh ekspor pada dasawarsa tersebut. Pemilihan industri manufaktur ringan (yang sifatnya padat karya dan teknologi rendah) merupakan langkah awal industrialisasi berorientasi ekspor yang dipandang lazim ditempuh oleh Negara-Negara Industri Baru dan kerap kali dipandang berpola hampir sama dengan Jepang ketika negara tersebut memulai industrialisasinya.

Korea Selatan berhasil mengeluarkan beberapa reformasi kunci bagi pembangunan industrinya, diantaranya kebijakan fiskal dan moneter yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat tabungan masyarakat, nilai tukar yang seragam dan zona perdagangan bebas. Korea Selatan juga membentuk beberapa badan yang mengambil pola Jepang, diantaranya adalah Korea Trade Promotion Corporation Agency (KOTRA) yang berpola seperti Japan Export Trade Organization (JETRO), Korean Development Bank dan Federation of Korean Industries yang memiliki kemiripan struktur dan fungsi seperti Keidanren atau Japan's Federation of Economic Organization.<sup>34</sup>

Perkembangan perekonomian Korea Selatan menurut para ahli peneliti dari Harvard University sangat menakjubkan sehingga dijuluki "keajaiban dari Sungai Han". Perkembangan performa Korea Selatan diakibatkan oleh beberapa faktor :

- a. Etos kerja, tradisi konfusian yang berkembang di hampir seluruh negara Asia Timur merupakan pendorong utama sistem kerja masyarakat Korea Selatan, hal ini hampir serupa dengan etika protestan yang berkembang di Eropa Barat.
- b. Merupakan residu yang ditinggalkan oleh Jepang, semenjak berakhirnya kolonialisme oleh negara matahari terbit di tahun 1945, Jepang tidak hanya

---

<sup>34</sup> Ezra F. Vogel, *The Four Little Dragons: The Spread of Industrialization in East Asia*, Cambridge, Harvard University Press, 1991, hal. 53.

meninggalkan luka akibat imperialisme namun juga ketertinggalan terhadap akses teknologi dan manajemen.

- c. Mobilitas sosial, dan penghancuran struktur tradisional yang dianggap mengekang oleh paham liberal, pembagian kerja, konfusius sosial, perang dan kembalinya para warga Korea Selatan dari luar negeri.
- d. Homogenitas kultural, hal ini terasa penting mengingat homogenitas di dalam budaya, tata sikap dan nilai yang menjadikan bangsa Korea Selatan terhindar dari konflik horizontal.
- e. Bantuan keuangan dan teknik dari pihak asing terutama Amerika Serikat.
- f. Peningkatan di sektor edukasi dan sisi edukasi di Korea Selatan itu sendiri.<sup>35</sup>

Faktor-faktor di atas menurut penelitian Universitas Harvard, memproduksi angkatan kerja yang disiplin dan terlatih dengan baik, akses terhadap investasi asing, peningkatan devisa nasional dan perluasan saham oleh pengusaha, dan yang terpenting adalah akses terhadap teknologi asing. Faktor tambahan adalah adanya stabilitas pemerintah dan perubahan orientasi kebijakan pemerintah dari substitusi impor menjadi substitusi ekspor.

Tinjauan mengenai investasi Korea Selatan di luar negeri sebenarnya dapat dimulai dari investasi Korea Selatan untuk pertambangan di New York pada tahun 1959. Investasi Korea Selatan di sektor manufaktur yang dilakukan di luar negeri baru dilakukan pada tahun 1974 dengan jumlah investasi yang relatif tidak menonjol. Sepanjang tahun 1970-an investasi Korea Selatan untuk sektor manufaktur tidak pernah lebih dari US\$ 39 juta dan nilai kumulatif hingga akhir periode tersebut hanya mencapai US\$ 126 juta.

Kenyataan ini sebenarnya erat terkait dengan pelaksanaan pembangunan industri di negara tersebut. Korea Selatan baru memulai pelaksanaan industrialisasinya pada tahun 1960-an dan pada periode tersebut Korea Selatan secara relatif masih menghasilkan produk-produk dengan kandungan teknologi yang relatif rendah. Pada kurun waktu yang sama dapat pula dinyatakan bahwa Korea Selatan masih memiliki keunggulan komparatif dalam industri-industri

---

<sup>35</sup> Donald Stone Mac Donald, *The Koreans Contemporary Politics and Society*, London, Westview Press, 1988, hal. 185.

yang padat karya sifatnya karena belum dilanda oleh laju apresiasi mata uangnya yang tinggi dan peningkatan upah buruh yang amat pesat, sebagaimana yang terjadi pada tahun 1980-an. Dengan demikian, kegiatan mengalokasikan investasi keluar negeri terutama untuk industri manufaktur dari Korea Selatan belumlah tampak menonjol.

Keadaan ini mulai berubah pada tahun 1980-an sejalan dengan keberhasilan pembangunan industri di Korea Selatan. Kemantapan basis industri manufaktur dan keberhasilan Korea Selatan meningkatkan jenjang teknologi pada pelaksanaan industrialisasinya telah menyebabkan industri padat karya dan teknologi rendah dipandang tidak lagi efisien. Berbagai faktor domestik seperti peningkatan upah buruh dan laju apresiasi telah mendorong pesatnya laju penempatan investasi Korea Selatan di luar negeri pada paruh kedua tahun 1980-an.

Gambaran mengenai investasi asing Korea Selatan untuk sektor manufaktur dapat dikatakan senada dengan pola lonjakan arus investasi asing Korea Selatan pada paruh kedua dasawarsa 1980-an, dalam arti baru pada periode tersebut Korea Selatan aktif melakukan investasi di sektor manufaktur. Hingga paruh pertama dasawarsa 1980-an, investasi asing Korea Selatan umumnya didominasi oleh sektor pertambangan, sumber-sumber alam dan kekuatan yang mencapai sekitar 51% dari keseluruhan investasi Korea Selatan di berbagai negara. Untuk periode yang sama, sektor manufaktur berada di urutan kedua dengan jumlah investasi mencapai hanya 16% dari keseluruhan investasi Korea Selatan dan sektor perdagangan mencatat nilai sebesar 12,5%.

Pada paruh kedua dasawarsa 1980-an, pola investasi Korea Selatan tampak mengalami pergeseran. Antara tahun 1985 hingga tahun 1990 nilai investasi Korea Selatan di sektor manufaktur meningkat hingga sekitar 27 kali. Pada tahun 1990 tercatat bahwa investasi di sektor manufaktur mencapai 59,5%, sektor perdagangan 25% dan sektor pertambangan dan kehutanan yang mendominasi pada periode sebelumnya, pada periode ini hanya mencatat sekitar 6% dari keseluruhan investasi asing Korea Selatan di luar negeri. Dalam keseluruhan

bagian terbesar investasi langsung Korea Selatan di luar negeri dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.<sup>36</sup>

Ketika Korea Selatan telah memiliki struktur industri yang relatif mantap dan jenjang teknologi yang ditempuhnya pun telah relatif tinggi, barulah investasi negara tersebut ke negara-negara berkembang lain di kawasan Asia berjalan dengan suatu pola yang lebih jelas.

Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, Korea Selatan tidak mau menerima investasi asing, kecuali hutang modal asing. Namun sesudah krisis 1997, kebalikanlah yang terjadi. Korea mulai melihat manfaat investasi asing seperti memperoleh akses kemajuan teknologi, penyertaan modal asing, dan jaringan ekspor ke pasar dunia. Masyarakat Korea malah menjadi anti hutang modal asing, karena hutang tersebut terbukti menjadi biang kerok kebangkrutan perusahaan-perusahaan di Korea.

Pemerintah Korea memberi persyaratan kinerja perusahaan asing, yaitu wajib transfer teknologi yang transparan, pengembangan *local content* dan perintisan ekspor. Kehadiran bisnis asing juga dianggap membantu perusahaan dalam negeri agar lebih produktif, efisien, dan kompetitif, sehingga menghindarkan kebangkrutan bisnis secara berkelanjutan.

Meskipun Korea Selatan pada tahun 1997 merupakan negara yang mengalami krisis paling parah, namun berkat serangkaian kebijakan yang tepat, negara ini mampu melakukan pemulihan ekonomi dalam waktu yang relative singkat. Upaya Korea Selatan menangani krisis ekonomi dengan bantuan IMF dilakukan melalui: stabilitas nilai tukar won; mendorong masuknya modal asing; restrukturisasi industri dan korporasi; reformasi sektor finansial, korporasi, pasar tenaga kerja dan sektor publik, penguatan pengusaha kecil dan menengah (SMEs) sebagai motor baru perekonomian Indonesia.<sup>37</sup>

---

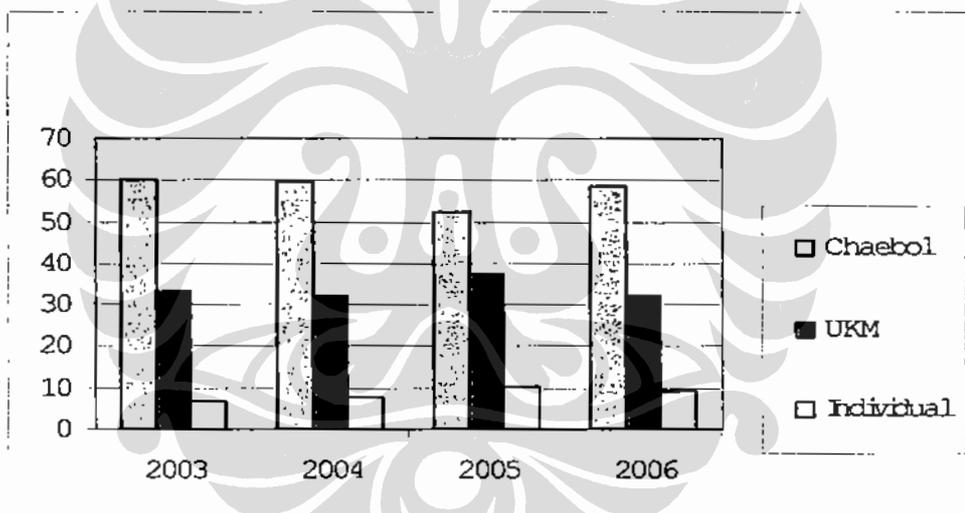
<sup>36</sup> Uraian mengenai bagaimana Korea Selatan melakukan industrialisasi dan mengejar ketertinggalan dari Jepang dapat dilihat dalam Ezra F. Vogel, *The Spread of Industrialization in East Asia*, Cambridge, Harvard University Press, 1991, hal. 43-65.

<sup>37</sup> Zainuddin Djafar, *Indonesia, ASEAN & Dinamika Asia Timur*, Jakarta, Pustaka Jaya, 2008, hal. 138.

Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) sesungguhnya telah berkembang pada tahap awal pembangunan ekonomi Korea. Pemerintah Korea Selatan selama ini menjaga pegusaha kecil dan menengah sebagai bagian vital dari ekonomi baru. Kekuatan perusahaan UKM di Korea terus dikembangkan untuk menghadapi persaingan dalam pertumbuhan ekonomi dan perbaikan struktur industri. Kategori UKM di Korea Selatan adalah mempunyai tenaga kerja kurang dari 300 orang dan memiliki modal sekitar 20-80 milyar won.

Pada awalnya konglomerat Korea Selatan yang dinamakan Chaebols mendominasi FDI Korea Selatan keluar negeri, sementara industri kecil dan menengah (UKM) fokus di pasar domestik. Hal ini dapat dilihat dalam gambar berikut ini:<sup>38</sup>

**Gambar 1. FDI Korea Berdasarkan Ukuran Perusahaan**



*Sumber: Korea Export-Import Bank, 2006.*

Pada tahun 2006 total investasi perusahaan besar US\$ 58,46 milyar atau sebesar 69 persen dari total investasi, UKM sebesar US\$ 17,84 milyar atau sebesar 27 persen, dan individual sebesar US\$ 3,2 milyar atau 4 persen. Tetapi dari jumlah proyek distribusinya berbeda, 54 persen untuk UKM, 37 persen untuk

<sup>38</sup> Lihat Deok Ryong Yoon. "Korea's Outward FDI in Asia: Characteristics and Prospects", dalam [www.djey.gov.kr/ep.go.kr](http://www.djey.gov.kr/ep.go.kr). Diakses tanggal 20 April 2008, pukul 20.15 WIB.

investor individual, dan 9 persen untuk perusahaan besar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih mengutamakan menanamkan modalnya berdasarkan besarnya nilai bukan kepada besarnya jumlah proyek. Sementara sektor UKM lebih kepada padat karya bukan padat modal seperti yang dilakukan oleh perusahaan besar. Investasi dari UKM meluas di semua sektor industri dan lebih menekankan di sektor industri manufaktur, konstruksi dan real estate. Keberadaan UKM memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Korea. Sifat UKM yang padat karya membuat sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang banyak.

Melalui serangkaian kebijakan, dukungan kinerja ekspor, serta komitmen politik yang kuat dari pemerintah, ekonomi Korea Selatan cepat pulih. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.<sup>39</sup>

**Tabel 2.1.**  
**Perkembangan GDP, GNI per Kapita dan Pertumbuhan Riil Korea**  
**(1998-2005)**

Tahun	GDP (US\$ juta)	GNI per Kapita	Pertumbuhan Riil
1998	346	7.355	6,9
1999	445	9.438	9,5
2000	512	10.841	8,5
2001	482	10.160	3,8
2002	547	11.499	7,0
2003	608	12.720	3,1
2004	681	14.193	4,6
2005	788	16.291	4,0

Sumber: *The Bank of Korea, 2005.*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi lonjakan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 9,5 persen pada tahun 1999 dibandingkan pada tahun 1998

<sup>39</sup> Zainuddin Djafar. *op.cit.* hal. 139.

sebesar 6,9 persen. Pasca krisis produk domestik kotor (GDP) Korea Selatan menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2001. Pada tahun 2005, GDP Korea mencapai 788 milyar US\$ dengan pertumbuhan riil sebesar 4,0 persen. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan pasca krisis menunjukkan tren yang relatif stabil.

Pemulihan ekonomi Korea berlangsung cepat karena salah satunya kinerja ekspor yang baik dan secara konsisten mengalami peningkatan. Sejak awal perekonomian Korea dibangun atas strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor. Dampaknya adalah terjadi peningkatan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan GDP yang signifikan.

Selanjutnya dalam tabel di bawah ini dapat dilihat neraca perdagangan Korea Selatan dari tahun 1998-2005:<sup>40</sup>

**Tabel 2.2.**  
**Neraca Perdagangan Korea Selatan**  
**(1998-2005)**

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan (milyar US\$)
	Nilai (milyar US\$)	Pertumbuhan (%)	Nilai (milyar US\$)	Pertumbuhan (%)	
1998	132,3	-2,8	93,3	-35,5	39,0
1999	143,7	8,6	119,8	28,4	23,9
2000	172,3	19,9	160,5	34,0	11,8
2001	150,4	-12,7	141,1	-12,1	9,3
2002	162,5	8,0	152,1	7,8	10,3
2003	193,8	19,3	178,8	17,6	15,0
2004	253,8	31,0	224,5	25,5	29,4
2005	284,4	12,0	261,2	16,4	23,2

Sumber: Korea International Trade Association (KITA), 2005.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 141.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pasca krisis, nilai perdagangan Korea menunjukkan kecenderungan meningkat. Walaupun nilai ekspor Korea pada tahun 1998 menurun sebesar -2,8 persen akan tetapi pada tahun 1999 nilai ekspor meningkat sangat jauh sebesar 8,6 persen sampai dengan tahun 2000 sebesar 19,9 persen. Pertumbuhan ekspor Korea pada tahun 2001 mengalami penurunan sebesar -12,7 persen akibat imbas memburuknya perekonomian global. Selanjutnya terjadi peningkatan kembali di tahun 2002 sebesar 8,0 persen.

Demikian juga halnya di sisi impor setelah mengalami penurunan secara drastis pada tahun 1998, pada tahun 1999 meningkat kembali dengan nilai sebesar 119,8 milyar US\$ atau sebesar 28,4 persen dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 impor Korea mengalami pertumbuhan positif. Peningkatan volume perdagangan pasca krisis juga diikuti dengan surplus perdagangan. Jika pada saat krisis Korea senantiasa mengalami defisit perdagangan, maka pasca krisis menikmati surplus perdagangan rata-rata 20 milyar US\$ per tahun. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil serta penguatan di sektor industri maka diperkirakan nilai perdagangan Korea untuk beberapa tahun kedepan masih akan menunjukkan perkembangan positif.

Dalam perkembangan selanjutnya untuk menarik masuknya modal asing ke Korea maka mulai 1 Januari 2004, Korea Selatan mengambil kebijakan menurunkan batas minimal yang bisa diberi insentif melalui skema *foreign investment zone* (FIZ). Skema FIZ ini sendiri sebetulnya sudah sejak lama diberlakukan di Korea. Dalam skema ini, Korea Selatan memberikan hak pemakaian tanah secara gratis dan pengurangan pajak selama 10 tahun kepada investor yang memenuhi syarat.

Korea Selatan menurunkan batas nilai investasi yang berhak diberi insentif ini. Untuk investasi di bidang manufaktur, batas minimal diturunkan dari US\$ 50 juta menjadi US\$ 30 juta. Untuk mereka yang bergerak di bidang pariwisata, investasi minimum yang mendapat insentif FIZ diturunkan dari US\$ 30 juta menjadi US\$ 20 juta. Untuk para pebisnis di bidang logistik, batas minimumnya turun dari US\$ 30 juta menjadi US\$ 10 juta. Penurunan batas ini bertujuan

menarik minat para investor kecil untuk menanamkan modalnya di semenanjung Korea.

Rencana penurunan batas minimal investasi dikompensasi dengan pengurangan pajak dari 7 tahun menjadi 10 tahun. Peraturan lamanya pemberian potongan pajak mulai berlaku pada 1 Januari 2005. Dengan penerapan dua peraturan ini, tahun 2004 benar-benar menjadi tahun investasi di Korea.

Selain skema FLZ, Korea juga memberi insentif melalui apa yang dinamakan skema *foreign exclusive industrial complex* (FEIC). Skema ini diberikan kepada investasi asing di bidang manufaktur dan teknologi tinggi yang mau menempatkan perusahaan dan pabriknya di enam area FEIC yang sudah dirancang pemerintah Korea (dengan luas total 4,23 juta meter persegi).

Perusahaan manufaktur dengan investasi di atas US\$10 juta diberikan insentif pembebasan harga sewa tanah senilai 75%. Akan halnya perusahaan di bidang teknologi tinggi meski hanya berinvestasi US\$ 1 juta, Korea Selatan bersedia memberi pembebasan sewa lahan. Selanjutnya agar lebih menarik lagi, pemerintah Korea Selatan juga berencana memberikan insentif FEIC bagi mereka yang hendak berinvestasi di 48 area bisnis yang dikelola oleh pihak swasta.

Insentif lainnya, mulai 1 Januari 2004 Korea memberi tambahan modal yang besarnya bervariasi kepada investor yang mau berinvestasi di sektor-sektor yang dipandang penting. Insentif ini diperuntukkan diantaranya kepada perusahaan yang bergerak di bidang teknologi tinggi, juga bagi mereka yang bergerak dalam industri pembuatan material dan suku cadang serta investor yang mau menanamkan modalnya dalam pembangunan pusat-pusat penelitian.

Korea Selatan semakin agresif memberikan insentif bagi investasi asing. Sementara itu, Indonesia baru sampai tahap ingin memberi layanan perizinan yang efisien. Hasilnya, menurut survei yang dilakukan UNCTAD, Korea Selatan kini masuk 10 besar tujuan investasi dunia. Survei itu meneliti persepsi perusahaan-perusahaan di dunia tentang iklim investasi di suatu negara.

## 2.2. Orientasi PMA Korea Selatan di Indonesia

Indonesia dan Korea Selatan merupakan dua negara Asia yang pernah mengalami penjajahan dan harus memulai pembangunannya dari nol. Kedua negara dapat dikatakan mulai dari titik start yang sama karena memperoleh kemerdekaan dalam jangka waktu yang sama. Akan tetapi dalam perkembangannya, kedua negara mengalami proses yang berbeda baik proses internal maupun eksternal yang sangat terkait dengan dunia internasional.

Faktor geografis suatu negara merupakan salah satu faktor utama dalam pembentukan lingkungan regional dan internasional. Hal itu juga berlaku untuk Korea Selatan dan Indonesia. Letak Korea Selatan dan Indonesia yang cukup strategis di lingkungan Asia menyebabkan kedua negara tersebut memegang peranan penting dalam pembentukan regional Asia pada khususnya, ataupun lingkungan internasional pada umumnya. Tindakan dan kebijakan kedua negara dapat mempengaruhi perkembangan wilayah masing-masing dan juga mempengaruhi perkembangan dunia walaupun dalam skala terbatas.

Dari sudut geopolitik, Semenanjung Korea berbatasan dengan China dan Rusia disebelah utara dan Kepulauan Jepang di sebelah timur. Keberadaan Korea Selatan tidak hanya dianggap sebagai titik penting dalam hubungan antar negara-negara di Asia Timur tetapi juga merupakan penghubung antara empat negara utama yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, dan Jepang. Sementara itu letak Indonesia diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta Benua Asia dan Australia juga menjadi titik penting dalam hubungan kerjasama antara negara-negara Asia Tenggara.

Indonesia dan Korea Selatan mempunyai perbedaan dalam sistem politik, latar belakang budaya dan cara pandang terhadap masalah-masalah tertentu. Namun hubungan ini dieratkan dengan membuka hubungan diplomatik yang ditandai dengan dibukanya kedutaan besar tiap-tiap negara pada tanggal 18 November 1973.<sup>41</sup> Meskipun telah terjadi beberapa perubahan dalam kedua negara dan wilayah sekitarnya, keduanya tetap menyadari keuntungan

---

<sup>41</sup> Yang Seung-Yoon, *40 Tahun (1966-2005) Hubungan Indonesia-Korea Selatan*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2005. hal. 11.

pengembangan politik yang saling menguntungkan dan program-program yang meliputi bidang politik dan diplomasi, perdagangan dan investasi dan bidang lainnya.

Karakteristik hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan dapat dijelaskan melalui konsep saling ketergantungan horisontal. Saling ketergantungan horisontal mengacu pada suatu keadaan dimana dua negara atau lebih saling bertukar pengaruh. Keadaan ini dapat diukur dari volume kontak bilateral dan ekspansi perdagangan dan investasi keduanya. Bagi Korea Selatan hubungan dengan Indonesia memberinya peluang untuk mengimbangi dominasi Jepang, China, Amerika Serikat dan negara-negara besar lain dalam mengakses sumber daya alam dan pasar hasil produksinya. Sedangkan bagi Indonesia, hubungan dengan Korea Selatan memberinya peluang untuk memperoleh akses alternatif bagi pasar ekspor ataupun sumber investasi dan teknologi.

Kehadiran PMA asal Korea di Indonesia untuk pertama kalinya adalah pada tahun 1968 di bidang perusahaan hutan oleh Nam-Bang Development Corporation. Investasi berikutnya dilakukan oleh PT. Miwon yang melakukan investasi untuk produk bumbu masak (sektor kimia) pada tahun 1974. Sampai tahun 1987 jumlah proyek-proyek PMA asal Korea di Indonesia relatif masih sangat rendah yakni hanya mencapai 22 proyek yang sebagian besar (10 proyek) bergerak di bidang perusahaan hutan dan industri perkayuan. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa awalnya kehadiran PMA asal Korea di Indonesia didasarkan pada motif "*resources seeking*" atau "*material seeking*".<sup>42</sup>

Pada tahun 1982 investasi dalam industri manufaktur di luar negara hanya mencapai 13,4% dari seluruh investasinya di luar negeri, tetapi pada tahun 1990-an investasi diluar negeri dalam industri manufaktur telah naik tajam menjadi 45,3% dari seluruh investasinya di luar negeri. Pada awalnya bagian terbesar dari investasi Korea diluar negeri dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena konglomerat yang besar-besar (*chaebol*) mendominasi sektor industri manufaktur Korea.

---

<sup>42</sup> Thee Kian Wic. *Industrialisasi di Indonesia, Beberapa Kajian*. Jakarta. LP3I:S, 1994. hal. 192.

Keunggulan hak milik (*ownership advantage*) yang dimiliki oleh konglomerat-konglomerat besar didukung dengan kemampuan penelitian-penelitian dan pengembangan yang sangat baik dan intensif menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan PMA Korea di luar negeri mampu mempertahankan daya saing internasionalnya berhadapan dengan keunggulan komparatif yang terus menurun dalam kegiatan mereka yang bersifat padat karya.<sup>43</sup>

Minat dan kecenderungan untuk melakukan investasi di Indonesia saat ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan Korea yang berskala besar seperti Samsung, Daewoo, Hyundai, Goldstar, dan lain sebagainya, tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan Korea yang berskala kecil dan menengah dengan teknologi relatif rendah. Hal ini disebabkan karena pada umumnya perusahaan-perusahaan yang berskala rendah dan menengah tersebut bersifat padat karya yang saat ini sudah tidak kompetitif lagi di Korea. Dengan demikian untuk mempertahankan kemampuan ekspornya mereka harus merelokasikan perusahaannya ke negara-negara yang memiliki keunggulan komparatif di bidang tenaga kerja. Namun dibandingkan dengan Jepang, pemerintah Korea sangat mengendalikan atau mengontrol aliran modal dari Korea ke luar.

Dari berbagai jenis industri, maka industri sepatu, pakaian jadi dan barang-barang elektronik merupakan industri yang banyak mendapatkan curahan investasi Korea Selatan, terutama untuk negara-negara ASEAN. Pada tahun 1990, keseluruhan investasi ke luar negeri untuk industri sepatu mencapai US\$ 17,7 juta dan 90,4% dari jumlah tersebut dialokasikan ke negara-negara ASEAN. Dari semua negara ASEAN, Indonesia merupakan penerima investasi terbesar untuk industri sepatu dan pakaian jadi, sementara Thailand untuk industri barang-barang elektronik.<sup>44</sup> Investasi Korea Selatan di Indonesia terkonsentrasi pada sektor yang padat karya dengan teknologi yang rendah. Sektor industri manufaktur berteknologi rendah seperti pakaian jadi dan sepatu merupakan sektor yang paling banyak dimasuki. Hal ini merupakan ciri yang menonjol dari investasi manufaktur Korea Selatan di Indonesia

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 159-166.

<sup>44</sup> Chung H. Lee, "Korea's Direct Foreign Investment in Southeast Asia", dalam *ASEAN Economic Bulletin*, Maret 1994. hal. 286.

Sementara ciri berskala relatif kecil terlihat pada jumlah modal yang terkandung dalam proyek investasi Korea Selatan di Indonesia. Meskipun jumlah modal yang ditanamkan Korea Selatan tidaklah sedikit, namun alokasi modal tersebut tersebar pada begitu banyak proyek mengakibatkan investasi Korea Selatan relatif tidak bersifat padat modal.

Jalinan kerjasama antara Samsung dengan Metrodata misalnya, bisa dikatakan mengikuti pola kerjasama Toyota dengan Astra pada pengembangan industri otomotif di Indonesia.

Lebih lanjut dalam merebut pasar domestik, Korea Selatan menempuh strategi memilih pasar yang berbeda dengan Jepang. Jika Jepang memasarkan produk elektronik seperti televisi Sony untuk masyarakat kelas atas, maka Korea Selatan mengandalkan Goldstar untuk merebut pasar domestik Indonesia kelas menengah ke bawah.<sup>45</sup> Hal ini sebetulnya memperlihatkan sekali lagi bahwa produk Jepang memang mempunyai kualitas teknologi di atas produk Korea Selatan dan karenanya produk Jepang mampu menguasai pasar.

Studi yang dilakukan Kim Young Soo mengenai investasi Korea Selatan di Indonesia semata-mata disebabkan oleh pergeseran struktur keunggulan komparatif (*comparative advantage*) industri manufaktur Korea Selatan pada pertengahan dasawarsa 1980an. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa 90% proyek investasi Korea Selatan di Indonesia baru dimulai pada dasawarsa 1980an ketika struktur industri Korea Selatan mengalami perubahan dan penekanan biaya produksi dipandang sebagai suatu keharusan. Data rinci mengenai proyek yang disetujui pada periode 1967-1990 adalah : 6 proyek untuk periode 1968-1973; 1 proyek pada periode 1974-1979; 5 proyek pada 1980-1985 dan 151 proyek pada 1986-1990.<sup>46</sup>

Proyek-proyek investasi Korea Selatan, mempunyai ciri-ciri padat karya dan tidak padat modal. Sektor-sektor yang dimasukinya pun terbatas yakni, industri pakaian jadi (*garment*), tekstil dan sepatu. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa daya tarik utama iklim investasi Indonesia pada periode tersebut adalah

---

<sup>45</sup> *Prospek*, 14 Maret 1992.

<sup>46</sup> Kim Young Soo, *Korean Direct Foreign Investment in Indonesia: A Study of Korean Joint Venture*, Tesis UI, Jakarta, Universitas Indonesia, 1990.

upah buruh yang murah dan perbaikan iklim investasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Gambaran mengenai alasan-alasan utama pelaksanaan investasi Korea Selatan di Indonesia pada periode tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.3.**  
**Motivasi FDI Korea Selatan di Indonesia**

Motivasi Utama	Persentase
Kondisi Indonesia (Faktor Penarik/ Eksternal) yaitu: murah nya upah buruh, kekayaan alam dan dukungan pemerintah terhadap kegiatan ekspor	47%
Kondisi Korea Selatan (Faktor Pendorong/ Internal) yaitu: peningkatan upah buruh dan laju apresiasi Won	40%
Kekuatan Internal Perusahaan, termasuk untuk menguasai akses pasar	10%
Untuk mencegah hambatan perdagangan	3%
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Kim Young Soo, Korean Direct Foreign in Indonesia: A Study of Joint Ventures, Jakarta, Universitas Indonesia, 1990.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa faktor kondisi Indonesia sebagai motivasi yang menarik bagi Korea Selatan untuk menanamkan modalnya yaitu sekitar 47%. Keunggulan lokasi (*locational advantage*) Indonesia tersebut ditandai dengan upah buruh yang murah, kekayaan sumber daya alam, dan dukungan pemerintah terhadap kegiatan ekspor. Kekuatan internal perusahaan atau keunggulan kepemilikan perusahaan (*ownership advantage*) hanya sebesar 10% dan menempati urutan yang ketiga.

Memperhatikan pendapat Hadi Soesastro, ia menyebutkan motivasi PMA Korea di Indonesia seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :<sup>47</sup>

**Tabel 2.4.**  
**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi PMA Korea di Indonesia**  
**(1993)**

No.	Faktor motivasi	%
1	Upah buruh murah	29
2	Orientasi ekspor	21
3	Ketersediaan sarana/prasarana	15
4	Dihilangkannya proteksi dari negara ketiga	14
5	Dihilangkannya hambatan/pembatasan investasi Indonesia	11
6	Kedekatan dengan sumber bahan baku	10
	Jumlah	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat PMA Korea di Indonesia yang berada pada tingkat pertama adalah upah buruh murah sekitar 29%. Faktor kedua adalah yang berorientasi ekspor sekitar 21% yang nantinya dapat memberikan keuntungan yang besar, dibandingkan kalau produk yang dihasilkan hanya untuk pasar dalam negeri saja. Faktor sumber bahan baku hanya menempati 10% dari total yang ada.

Hadi Soesastro menyatakan bahwa arus investasi di suatu kawasan dipengaruhi atas faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*). Gelombang investasi pertama pada tahun 60-70-an, arus investasi Jepang ke Asia Timur di dorong oleh proteksi pasar local dan apresiasi yen. Arus investasi ini khususnya ditujukan ke sektor tekstil dan alat listrik rumah tangga.

Gelombang II tahun 70-an di dorong oleh prospek kawasan yang cerah dan tersedianya modal yang murah. Gelombang ini mengarah ke proyek substitusi

<sup>47</sup> Hadi Soesastro, *Korean Investments in Indonesia*, Jakarta, CSIS, 1993, hal 14.

impor dalam industri dasar serta penciptaan ekspor platform AS di bidang *consumer electronics* dan semi konduktor.

Gelombang III yang melibatkan relokasi industri padat karya dari Jepang dan negara industri baru Asia terutama ke kawasan ASEAN merupakan akibat apresiasi yen dan mata uang lain pada pertengahan 80-an. Dorongan ini terjadi bersama dengan peningkatan daya tarik sebagai akibat perbaikan iklim investasi dan kinerja ekspor kelompok negara ASEAN.

Gelombang IV ada beberapa hipotesis. Salah satu melihat kedalam investasi di Cina yang akan menyebabkan pengalihan besar-besaran dari tujuan investasi lain. Tapi pandangan lain melihat gelombang IV ini bukan ditandai oleh pergeseran dalam tujuan investasi melainkan dalam peningkatan modal Overseas Chinese seperti tercermin dalam peningkatan arus investasi dari Hongkong dan Taiwan di Cina.

Pandangan lain melihat gelombang ke 4 akan bersumber pada Jepang. Arus investasi Jepang ini didorong oleh pertimbangan strategis yang lebih berorientasi ke produk dari pada ke pasar. Strategi ini merupakan bagian dari globalisasi perusahaan Jepang yang melibatkan teknologi baru seperti serat optik (*fiber optics*) yang didalamnya terdapat kegiatan produksi yang berbeda dalam taraf penguasaan teknologinya akan dilakukan diluar Jepang. Tapi Jepang tetap akan mempertahankan kegiatan produksi yang melibatkan *core technologies*.

Sementara Thee Kian Wie<sup>48</sup> menyebutkan faktor-faktor pendorong dan penarik yang mempengaruhi gelombang penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Faktor-faktor penarik

Kebijaksanaan pemerintah yang menguntungkan investor adalah merupakan faktor penarik yang mempengaruhi gelombang penanaman modal di Indonesia. Kemerosotan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia sejak tahun 1982 sebagai akibat pertumbuhan perekonomian internasional yang tidak menguntungkan terutama disebabkan melemahnya pasar minyak bumi dunia memaksa Indonesia menempuh beberapa langkah drastis untuk menghadapi

---

<sup>48</sup> Thee Kian Wie, *loc.cit.*

kecenderungan yang menurun termasuk perubahan kebijakan penanaman modal asing yang semula sangat restriktif, tercermin pada besarnya pengawasan dan pembatasan yang dikenakan terhadap operasi penanaman modal asing.

Tidaklah mengherankan kebijakan penanaman modal asing yang tidak kondusif sejak tahun 1974 dan terutama sejak awal 1980-an menyebabkan kecenderungan menurunnya arus PMA ke Indonesia. Kemerosotan tujuan penerimaan pemerintah dari minyak bumi pada tahun 1982 dan terutama pada tahun 1986 sangat mengurangi kemampuan pemerintah Indonesia untuk membiayai berbagai proyek pembangunan termasuk diantaranya pembangunan industri dasar berskala besar yang sangat padat modal dan berteknologi. Sebagai akibat pemerintah sejak tahun 1989 mulai memperkenalkan serangkaian langkah deregulasi yang bertujuan untuk memperbaiki iklim penanaman modal dan mendukung sektor swasta termasuk swasta asing untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam perekonomian Indonesia.

#### b. faktor pendorong

##### 1. Faktor-faktor terdekat

Faktor-faktor terdekat utama yang mendorong perusahaan dari negara-negara NIE's Asia untuk memindahkan tempat operasi mereka keluar negeri adalah meningkatnya biaya-biaya lahan dan tenaga kerja di negara-negara itu yang menyebabkan banyak diantara operasi mereka menjadi kurang berdaya saing. Khusus Korea Selatan dan Taiwan ada dua faktor utama yang menyebabkan industri mereka yang bersifat padat karya kurang bersaing di pasar internasional yakni menguatnya nilai mata uang domestik dan kenaikan upah tenaga kerja yang tajam. Karena kehilangan keunggulan komparatif di berbagai negara industri yang padat karya, banyak perusahaan-perusahaan Korea Selatan dan Taiwan seperti halnya perusahaan Jepang pada awal 1970-an mengalihkan sumber daya mereka ke jenis produksi lainnya yang diantaranya masih mempunyai keunggulan komparatif atau menanamkan modal mereka dalam penanaman modal portofolio dan bukan penanaman langsung di luar negeri.

Namun perusahaan-perusahaan Korea Selatan telah menghimpun berbagai keahlian manajerial yang mendorong pertumbuhan ekonomi negara mereka yang

terus meningkat (ditandai dengan besarnya ekspor) dan menghimpun banyak pengalaman dalam transaksi-transaksi di luar negeri melalui kegiatan mereka diberbagai industri yang berorientasi ekspor. Keahlian manajerial yang sangat tinggi dalam menangani industri yang berorientasi ekspor dan pengalaman yang sangat banyak dalam kegiatan pemasaran di luar negara dengan berbagai transaksinya menyebabkan para pemilik perusahaan-perusahaan Korea Selatan dan Taiwan mempunyai keunggulan khusus dibandingkan investor asing lainnya. Faktor ini mendorong perusahaan-perusahaan Korea Selatan dan Taiwan untuk melakukan investasi langsung di negara-negara Asia Tenggara.

## 2. Kebijakan pemerintah negara asal investor

Kebijakan pemerintah negara asal investor (*home government policies*) juga memainkan peranan penting dalam mendorong investasi Korea Selatan di luar negeri. Sikap positif pemerintah negara-negara NIE's terhadap penanaman modalnya di luar negeri akhir-akhir ini dapat dipahami karena adanya surplus dalam neraca berjalan dan akan lebih produktif apabila diinvestasikan di luar negeri.

Pemerintah Korea Selatan mendorong penanaman modal di luar negeri dengan menyederhanakan peraturan-peraturan dan prosedur yang mengatur atau mengawasi penanaman modal ke luar negeri. Disamping itu pemerintah Korea Selatan juga membentuk pusat konsultasi PMA untuk perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang merencanakan untuk menanamkan modalnya di negara-negara Asia Tenggara, termasuk pembentukan badan promosi untuk perusahaan-perusahaan kecil.

Menurut World Investment Report 1994, aliran PMA dari negara maju ke negara berkembang bergantung pada hubungan saling pengaruh mempengaruhi antara faktor-faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor ekonomi yang berpengaruh adalah:

- a. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) negara penerima modal asing
- b. Potensi pasar dalam negeri (*the size of the domestic markets*)
- c. Tingkat keuntungan yang tinggi (*higher profitability*)
- d. Ketersediaan tenaga kerja (*the availability of labour*)

- e. Ketersediaan sarana dan prasarana (*infrastructure*)
- f. Perubahan atau apresiasi nilai tukar mata uang (*the movement of exchange rates*)

Faktor-faktor kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh adalah:

- a. Pengembangan sektor swasta (*private sector development*)
- b. Pembaharuan kebijaksanaan ekonomi makro (*macro economic reform*)
- c. Liberalisasi (*liberalization*)
- d. Swastanisasi (*privatization*)
- e. Integrasi regional (*regional integration*)

Dalam perkembangan selanjutnya dapat dilihat motivasi Korea Selatan dalam melakukan investai ke luar negeri menurut Bank Ekspor-Import Korea yang bekerjasama dengan Deok Ryong Yoon seorang peneliti senior dari *Korea Institute for International Economic Policy (KIEP)* sebagai berikut:<sup>49</sup>

**Tabel 2.5.**  
**Motivasi FDI Korea Berdasarkan Periode**

	1968- 1993	1994- 1996	1997- 2001	% Setelah 2002
Keamanan atau perkembangan pasar lokal	28,9	50,2	52,4	47,1
Memfaatkan upah buruh lokal	14,7	37,2	30,3	38,5
Menghindari hambatan-hambatan perdagangan	1,7	2,5	2,3	3,1
Keamanan bahan mentah	3,8	4,8	3,9	4,4
Menggunakan teknologi lanjutan atau ketrampilan manajemen	1,1	2,6	7,7	4,1
Perkembangan sumber daya alam	49,9	2,7	3,3	2,8

Sumber: *The Export-Import Bank of Korea, 2004.*

<sup>49</sup> Lihat Deok Ryong Yoon, "Korea's Outward FDI in Asia: Characteristics and Prospects". dalam [www.dekyoon.kiep.go.kr](http://www.dekyoon.kiep.go.kr). Diakses tanggal 20 April 2008, pukul 20.15 WIB.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa motivasi yang paling utama dalam melakukan investasi adalah kemandirian atau perkembangan pasar lokal yang mencakup hampir 50% dari total investasi dari para investor. Motif kedua yang sangat penting adalah penurunan biaya produksi yang diambil dari upah buruh murah di negara tuan rumah. Motif yang lain adalah keamanan bahan mentah, teknologi lanjutan, dan perkembangan sumber daya lama. Sumber daya alam menjadi tujuan utama dari FDI Korea sampai tahun 1993, artinya kebanyakan investasi dilakukan dengan mengakses sumber daya alam. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya sumber daya alam bukan lagi menjadi tujuan utama, melainkan keamanan menjadi tujuan utama dan memanfaatkan upah buruh murah menjadi tujuan kedua yang sangat penting.

### **2.3. Orientasi PMA Korea Selatan di ASEAN**

Setelah krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997, menurut Rodolfo C. Severino pada tahun 2000 ada dua prioritas kebijakan utama yang menjadi perhatian penting bagi ASEAN yaitu investasi dan perdagangan. Melalui kedua prioritas tersebut ASEAN diharapkan dapat muncul sebagai organisasi regional yang bersifat integratif.<sup>50</sup>

Untuk meningkatkan arus investasi langsung, baik yang berasal dari negara-negara ASEAN maupun non-ASEAN, negara-negara ASEAN telah sepakat untuk membentuk suatu Kawasan Investasi ASEAN (ASEAN Investment Area/AIA). Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (FA-AIA) telah ditandatangani di Manila tanggal 7 Oktober 1998. Hal ini akan dicapai dengan menyediakan lingkungan investasi yang kompetitif, terbuka dan liberal serta dengan mempromosikan ASEAN sebagai kawasan industri.

Kebijakan perdagangan dan investasi dewasa ini lebih banyak diimplementasikan dalam level nasional. Namun, bagi beberapa negara, terutama negara-negara berkembang, basis nasional sulit dibangun karena kurangnya pengetahuan serta keahlian dalam pembuatan, negosiasi, dan implementasi

---

<sup>50</sup> Rodolfo C. Severino, *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community*, Singapore, ISEAS Publisher, 2006, hal. 244-245.

kebijakan terkait dengan investasi luar negeri. Pendekatan regional ataupun multilateral merupakan alternatif yang lebih baik. Produksi regional dapat memberikan keuntungan terhadap total produksi skala nasional, seperti yang dialami oleh negara-negara di ASEAN. Pendekatan regional dapat menjembatani kebijakan nasional dan global. Pendekatan regional merupakan sarana optimalisasi keuntungan komparatif wilayah melalui upaya-upaya saling melengkapi dalam sektor produksi dan perdagangan.<sup>51</sup>

Negara-negara ASEAN telah melakukan langkah berani di bidang investasi (*investment bold measures*) untuk memfasilitasi aliran investasi ke dalam kawasan. Berdasarkan pengaturan bold measures, para investor akan mendapat paling kurang beberapa kemudahan untuk proyek investasi yang disampaikan sebelum tanggal 31 Desember 2000 dan disetujui kemudian sebagai berikut:

1. Pembebasan atas pajak penghasilan perusahaan minimum tiga tahun atau *investment tax allowances* perusahaan minimal 30%
2. Kepemilikan saham 100% saham asing
3. Pembebasan bea masuk atas impor barang modal
4. Akses ke pasar domestik
5. Pemberian masa sewa lahan industri minimal 30 tahun
6. Penggunaan tenaga kerja asing
7. Proses kepabeanan yang cepat

Disamping melakukan kegiatan kolektif yang mengikat, masing-masing negara anggota juga melakukan langkah-langkah individu yang akan lebih meningkatkan iklim investasinya bagi investasi asing. Langkah-langkah individu mencerminkan kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan dan yang direncanakan untuk lima tahun mendatang. Untuk Indonesia beberapa langkah individu yang dilakukan antara lain dengan menghapus berbagai hambatan investasi seperti pembatasan kepemilikan modal asing dan membuka lebih banyak industri bagi investasi asing. Dengan demikian langkah-langkah individu yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Individu (Individual Action Plan/IAP) diharapkan akan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 340

mempercepat proses AIA dalam merealisasikan visi ASEAN sebagai kawasan investasi yang unggul dan kompetitif.

Sejumlah kegiatan penting telah dilaksanakan yang menyampaikan pesan ASEAN sebagai suatu kawasan investasi. Para investor didorong dan diarahkan untuk berpikir secara regional, bertindak regional dan melakukan investasi dalam konteks regional. Investor-investor yang akan memperoleh keuntungan yang maksimal adalah mereka yang menerapkan strategi investasi regional dengan mendayagunakan segala keuntungan dari setiap pengaturan ekonomi ASEAN dengan cara yang terintegrasi dan terkonsolidasi.

Alasan untuk melakukan kerjasama ASEAN dalam investasi ialah untuk meningkatkan arus investasi ke wilayah ASEAN, baik secara absolut maupun sebagai persentase arus investasi ke wilayah ASEAN. Alasan lainnya adalah pengembangan suatu wilayah investasi yang akan mendukung perwujudan AFTA dengan lancar. Selain itu untuk memudahkan dan mendorong pembangunan jaringan kerjasama regional yang didasarkan atas pembagian kerja regional dan eksploitasi faktor lokasi. Disamping itu alasan yang lain adalah memproyeksikan ASEAN sebagai wilayah investasi yang paling unggul diantara negara-negara berkembang. Dengan mengusahakan penarikan investasi secara bersama, negara-negara ASEAN dapat memanfaatkan efek sinergi dan menarik lebih banyak aliran investasi.

Sesuai asumsi dasar *institutional building* dalam paradigma neo-liberal institusionalisme, tingkah laku rasional telah mendorong negara mencari nilai positif sebuah kerja sama. Karena pemeran utama dalam institusi kerja sama adalah negara, maka tetap ada kepentingan nasional yang melandasi masing-masing negara untuk bekerja sama. Krisis Asia serta integrasi ekonomi di kawasan lain mendorong negara-negara Asia termasuk Korea Selatan untuk memperkokoh kerja sama kawasan. Korea Selatan yang sebelumnya lebih memprioritaskan pola kerja sama multilateral dan bilateral, jadi lebih membuka diri terhadap kerja sama regional. Bahkan Korea Selatan mengambil peran yang cukup penting sebagai konseptor kerja sama kawasan.

Setidaknya terdapat beberapa asumsi yang menjadi landasan berpikir dalam menganalisis pandangan Korea Selatan terhadap kerja sama ASEAN sehubungan dengan peran yang dijalankan. *Pertama*, interdependensi negara-negara Asia selama ini telah membuktikan bahwa perekonomian Korea Selatan rentan dan sensitif terhadap tekanan eksternal. Pada saat krisis Asia melanda, perekonomian Korea Selatan sebenarnya relatif stabil. Kondisi makro ekonomi dinyatakan sehat dengan anggaran seimbang, tingkat tabungan yang tinggi, serta angka inflasi relatif rendah. Oleh karena itu banyak ahli ekonomi terkejut dengan kemunduran ekonomi yang dialami Korea Selatan sesaat setelah krisis terjadi mengingat hingga tahun 1996 defisit perdagangan Korea Selatan selalu di bawah 5% dari total GDP. Jumlah ini tergolong kecil sehingga bukan menjadi sesuatu hal yang serius bagi para pengambil kebijakan ketika itu.<sup>52</sup> Namun kenyataannya Korea Selatan tidak dapat bertahan dari serangan krisis. Oleh karena itu, Korea Selatan memandang perlunya kerja sama kawasan selain upaya nasional untuk memperkuat fondasi perekonomian sehingga tidak mudah terkena imbas krisis.

*Kedua*, melalui kerja sama kawasan, Korea Selatan dapat memaksimalkan keuntungan karena *cost* yang ada ditanggung bersama. *Ketiga*, Korea Selatan dapat memanfaatkan kerja sama regional ASEAN sebagai salah satu sarana diplomasi terhadap Korea Utara walaupun sifatnya masih tidak langsung. Ini terkait dengan kepentingan politik Korea Selatan.

ASEAN merupakan salah satu tempat yang penting bagi perkembangan investasi Korea Selatan di dunia. Proporsi investasi di ASEAN mengalami peningkatan dari tahun 2003 sampai tahun 2006, walaupun ASEAN bukanlah tujuan investasi yang menempati urutan yang pertama bagi investasi Korea Selatan di dunia. Berikut ini akan dibahas negara tujuan utama investasi Korea Selatan di dunia.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Kwan S.Kim. "The 1997 Financial Crisis and Governance: The Case of South Korea", dalam [http://www.idc.go.jp/English/Inter/Sympo/pdf/kim\\_summary.pdf](http://www.idc.go.jp/English/Inter/Sympo/pdf/kim_summary.pdf), Diakses tanggal 1 Maret 2008, pukul 19.00.

<sup>53</sup> Deok Ryong Yoon. *loc.cit.*

**Tabel 2.6.**  
**Negara Tujuan Investasi Korea Selatan di Dunia**  
**(US\$. juta)**

	2003		2004		2005		2006	
	Proyek	Jumlah	Proyek	Jumlah	Proyek	Jumlah	Proyek	Jumlah
<b>China</b>	1.679	1.666	2.142	2.298	2.240	2.647	2.300	3.310
(rasio)	(59,8)	(41,0)	(56,9)	(38,4)	(51,0)	(40,4)	(44,4)	(30,8)
<b>USA</b>	526	1.051	828	1.339	1.070	1.243	1.257	1.754
(rasio)	(18,7)	(25,9)	(22,0)	(22,4)	(24,4)	(19,0)	(24,2)	(16,3)
<b>ASEAN</b>	234	545	282	513	424	650	708	1.349
(rasio)	(8,3)	(13,4)	(7,5)	(8,6)	(9,7)	(9,9)	(13,7)	(12,6)
<b>EU</b>	50	194	79	674	110	556	128	1.051
(rasio)	(1,8)	(4,8)	(2,1)	(11,3)	(2,5)	(8,5)	(2,5)	(9,8)
<b>Total</b>	2.809	4.062	3.764	5.989	4.389	6.557	5.185	10.731
(rasio)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

*Sumber: Bank Ekspor-Impor Korea, 2006.*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa proporsi investasi Korea Selatan di ASEAN meningkat dari 9,9 persen atau sebesar 650 juta US\$ di tahun 2005 menjadi 12,6 persen atau sebesar 13,49 miliar US\$ di tahun 2006. Begitu juga dengan jumlah proyek di ASEAN meningkat dari 9,7 persen atau 424 proyek di tahun 2005 menjadi 13,7 persen atau 708 proyek di tahun 2006. Investasi Korea Selatan yang terbesar dari tahun 2003-2006 adalah di China. Pada tahun 2006 jumlah investasi Korea Selatan di China berdasarkan proyek sebesar 2.300 atau sebesar 44,4 persen dari total investasi di dunia. Nilai investasi juga meningkat pada tahun 2006 sebesar 3,31 miliar US\$ atau 30,8 persen dari total nilai investasi Korea Selatan di dunia.

Tren regional yang dapat dilihat dari perkembangan investasi Korea Selatan ke ASEAN adalah sebagai berikut:

1. China tetap memimpin pertumbuhan investasi Korea Selatan di Asia.

2. Korea Selatan lebih menyukai China sebagai pusat industri manufaktur dan menjadi pasar yang sangat penting.
3. ASEAN lebih banyak investasi di bidang komunikasi dan pembangunan infrastruktur.
4. ASEAN menjadi tempat yang sangat penting bagi kenyamanan perusahaan multinasional Korea Selatan untuk dapat mengakses sumber daya alam.

Hubungan investasi antara ASEAN dan Korea Selatan mempunyai sejarah yang sangat panjang dibandingkan dengan regional yang lain. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan investasi Korea yang masuk ke negara-negara ASEAN sampai dengan tahun 2003.<sup>54</sup>

**Tabel 2.7.**  
**Investasi Korea Selatan yang Masuk ke ASEAN Berdasarkan Negara**  
**(US\$. 000)**

Negara	2001	2002	2003	Total (rata-rata)
Malaysia	19.872	6.189	6.428	334.284 (8,4%)
Thailand	30.777	31.480	26.496	528.458 (13,3%)
Indonesia	169.480	64.728	78.528	1.237.984 (31,1%)
Singapura	40.918	48.166	234.343	422.798 (10,6%)
Filipina	56.933	26.732	16.363	500.374 (12,6%)
Vietnam	46.280	135.403	136.512	880.822 (22,1%)
Kamboja	5.540	3.877	9.219	34.618 (0,9%)
Myanmar	2.948	660	0	29.678 (0,7%)
Laos	35	50	115	7.090 (0,2%)
Brunei	0	0	0	1.937 (0%)

Sumber: Bank Ekspor-Impor Korea, dan Korea-ASEAN FTA, 2003.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2003 Indonesia menempati urutan teratas total investasi Korea yaitu sebesar 1.238 juta

<sup>54</sup> *Ibid.* hal. 88.

US\$ atau sebesar 31,1%. Urutan kedua adalah Vietnam dengan total investasi sebesar 880,8 juta US\$ atau sebesar 22,1%.

Setelah membahas masalah investasi Korea Selatan ke negara-negara di ASEAN, pembahasan berikut adalah mengenai jumlah ekspor dan impor Korea Selatan ke negara-negara ASEAN.<sup>55</sup>

**Tabel 2.8**  
**Ekspor Korea ke ASEAN dan Impor dari ASEAN**  
(US\$ juta, persen)

Tahun	Total Ekspor	Ekspor ke ASEAN	Rata-rata	Total Impor	Impor dari ASEAN	Rata-rata
1997	136.164	20.365	15,0	144.616	12.549	8,7
1998	132.313	15.328	11,6	93.282	9.135	9,8
1999	143.685	17.708	12,3	119.752	12.250	10,2
2000	172.268	20.134	11,7	160.481	18.173	11,3
2001	150.439	16.459	10,9	141.098	15.916	11,3
2002	162.471	18.400	11,3	152.126	16.757	11,0
2003	193.817	20.253	10,4	178.827	18.459	10,3
2004	207.591	19.800	9,5	183.058	18.220	10,0

Sumber: KOTIS (Korea International Trade Association), 2004.

Dari tabel itu dapat dilihat bahwa terdapat penurunan ekspor ke ASEAN dari tahun 1997 ke tahun 1998 yaitu dari 20.365 juta US\$ menjadi 15.328 juta US\$ atau sebesar 5.037 juta US\$. Hal ini disebabkan terjadinya krisis moneter di Korea Selatan. Begitu juga sebaliknya dengan impor dari negara ASEAN ke Korea Selatan mengalami penurunan dari tahun 1997 ke tahun 1998 yaitu 12.549

<sup>55</sup> Kwon Yul. "Toward Comprehensive ASEAN-Korea Economic Cooperation". *East Asian Review*, Vol. 16, No. 4, Winter 2004, hal. 83.

juta US\$ menjadi 9.135 juta US\$ atau sebesar 3.404 juta US\$. Hal ini juga terjadi karena ada beberapa negara di ASEAN yang terkena dampak dari krisis moneter tersebut ( Thailand, Indonesia, Malaysia). Selanjutnya sampai dengan tahun 2004 terjadi peningkatan baik ekspor ke ASEAN maupun impor dari ASEAN.

Tabel berikut adalah negara-negara ASEAN melakukan ekspor ke Korea Selatan berdasarkan produk yang diekspor.<sup>56</sup>

**Tabel 2.9**  
**Ekspor ASEAN ke Korea Berdasarkan Produk**  
**(US\$ .000, persen)**

1993			2003		
Komoditi	Ekspor	Rata-rata	Komoditi	Ekspor	Rata-rata
Produk Mineral	2.944.718	40,3	Mesin dan listrik	7.979.970	43,2
Mesin dan listrik	1.311.110	18,2	Produk Mineral	5.312.069	28,8
Kain dan pakaian jadi	1.252.117	17,1	Kimia	841.028	4,6
Bahan makanan olahan	232.771	3,2	Plastik	597.091	3,2
Kimia	208.763	2,9	Logam dasar	592.216	3,2
Total	7.809.763	100	Total	18.438.466	100

*Sumber: KOTIS (Korea International Trade Association), 2003.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam jangka waktu 10 tahun terjadi perubahan ekspor yang signifikan. Pada tahun 1993 total ekspor ASEAN ke Korea Selatan sebesar 7.309,8 juta US\$ dan pada tahun 2003 sebesar 18.458,5 juta US\$ atau lebih dari 100%.. Pada tahun 2003, komoditi mesin dan listrik menempati urutan teratas yaitu sebesar 7.980 juta US\$ atau sebesar 43,2%, sementara pada tahun 1993 ekspor komoditi ini sebesar 1.331,1 juta US\$ atau sebesar 18,2 % dari total ekspor ke Korea Selatan.

<sup>56</sup> *Ibid.* hal. 84.

Selanjutnya adalah impor negara-negara ASEAN dari Korea Selatan dengan perbandingan antara tahun 1993 dan 2003, atau perkembangan dalam jangka waktu 10 tahun.<sup>57</sup>

**Tabel 2.10.**  
**Impor ASEAN dari Korea Berdasarkan Produk**  
**(US\$ .000, persen)**

1993			2003		
Komoditi	Impor	Rata-rata	Komoditi	Impor	Rata-rata
Mesin dan listrik	4.063.012	40,4	Mesin dan listrik	10.501.464	51,9
Logam dasar	1.268.490	12,5	Logam dasar	1.908.313	9,4
Logam dasar dan barang logam	1.365.216	13,5	Produk Mineral	1.837.489	9,1
Bahan makanan olahan	603.375	6,0	Kimia	1.139.079	5,7
Produk Mineral	603.139	6,0	Tekstil	1.111.735	5,5
Total	10.109.387	100	Total	20.251.386	100

Sumber; KOTIS (Korea International Trade Association), 2003.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kenaikan impor yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN dari Korea pada tahun 1993 sebesar 10.109,3 juta US\$ naik lebih dari 100% pada tahun 2003 yaitu sebesar 20.253,3 juta US\$. Komoditi impor yang dominan dari Korea Selatan sama dengan yang diekspor ke Korea Selatan yaitu mesin dan listrik pada tahun 2003 sebesar 10.501,4 juta US\$ atau sebesar 51,9% dari total impor Korea Selatan.

Tabel berikut menggambarkan investasi Korea Selatan di ASEAN berdasarkan bidang industri sampai tahun 2003.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 85.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 87.

**Tabel 2.11.**  
**Investasi Korea ke ASEAN Berdasarkan Industri**  
**(US\$. 000)**

<b>Industri</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>Total Investasi Bersih</b>
Pertanian	772	592	1.247	46.294
Pertambangan	11.013	23.334	114.130	531.046
Manufaktur	267.681	205.752	132.944	2.404.675
Konstruksi	33.032	11.519	10.833	160.208
Wholesale/Retail	27.774	14.789	200.581	228.614
Storage	954	2.573	1.594	18.724
Telekomunikasi	274	11.328	37.283	229.161
Keuangan/Asuransi	5	0	0	455
Hotel/Restoran	1.135	719	640	45.513
Real estate/Jasa	30.143	46.621	8.752	378.778
Yang lainnya	0	54	540	54

*Sumber: Bank Ekspor-Impor Korea, dan Korea-ASEAN FTA, 2003.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total investasi Korea yang paling besar adalah di bidang industri manufaktur. Sampai tahun 2003 jumlah total industri di bidang manufaktur ini sebesar 2.404,7 juta US\$ atau sebesar 59,5% dari total investasi bersih. Bidang industri yang kedua adalah bidang pertambangan dengan total investasi bersih sebesar 531,0 juta US\$ atau sebesar 13,1%.

Walaupun di bidang industri manufaktur terjadi penurunan dari tahun 2000 sampai 2003, akan tetapi industri ini masih menempati urutan terbesar. Penurunan ini terjadi karena industri manufaktur merupakan *sunset industry* di ASEAN. Lain halnya dengan industri telekomunikasi yang semakin meningkat. Industri telekomunikasi Korea Selatan unggul diantaranya adalah telepon genggam. Hal ini disebabkan permintaan atas peralatan komunikasi tetap tinggi.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 13 desember 2005 diadakan kerjasama *The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea*, dalam rangka Free Trade Area ASEAN-Korea (AKFTA) yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia.<sup>59</sup>

Tujuan dari kerangka kerjasama ekonomi antara ASEAN Korea (AKFTA) ini adalah:

1. Memperkuat dan meningkatkan ekonomi, perdagangan dan kerjasama investasi diantara semua pihak (negara-negara ASEAN dan Korea).
2. Meliberalisasikan secara progresif dan mempromosikan perdagangan barang dan jasa juga menciptakan dan memfasilitasi investasi yang transparan dan liberal.
3. Mengeksplorasi area baru dan mengembangkan langkah-langkah yang sesuai untuk mempererat kerjasama ekonomi dan integrasi.
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang efektif dari negara baru anggota ASEAN dan menjembatani kesenjangan pembangunan diantara semua pihak yang terlibat.
5. Membangun sebuah kerangka kerja yang kooperatif untuk memperkuat lebih lanjut kerjasama ekonomi diantara semua pihak yang terlibat.

Ruang lingkup kerjasama ASEAN-Korea FTA adalah liberalisasi di bidang perdagangan barang (*trade in goods*), perdagangan jasa (*trade in service*), investasi (*investment*), dan kerjasama ekonomi di 19 bidang termasuk dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, komoditas perkebunan dan kehutanan, sanitary phytosanitary (SPS), pertambangan, energi, sumber daya alam, perkapalan dan transportasi laut, serta film.

Implementasi AKFTA bagi sektor pertanian Indonesia adalah :

1. Peningkatan volume perdagangan produk pertanian melalui penurunan tarif bea masuk di Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara yang sudah

---

<sup>59</sup> *The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea*. Deplu RI.

masuk negara industri dengan income per kapita yang cukup tinggi merupakan pasar potensial bagi peningkatan pemasaran produk pertanian Indonesia.

2. Peningkatan kerjasama investasi.
3. Kerjasama ekonomi melalui peningkatan *capacity building*.

Pembentukan AKFTA merupakan peluang yang baik bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor komoditi non migas ke Korea. Dengan adanya AKFTA berarti hambatan tarif ke Korea menjadi berkurang. Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut karena negara-negara ASEAN lainnya akan berkompetisi untuk meningkatkan ekspornya masing-masing. Selain dengan negara-negara ASEAN, Indonesia juga akan bersaing dengan China dan Vietnam. China dan Vietnam mengekspor produk-produk yang relatif sama, rendah teknologi dan padat karya dengan Indonesia. Ekspor kedua negara ini tumbuh pesat disejumlah pasar yang semula didominasi oleh Indonesia.<sup>60</sup> Diberbagai komoditas ekspor penting, seperti kain dan alas kaki ekspor Indonesia mengalami penurunan. Sebaliknya ekspor dari China dan Vietnam tumbuh secara signifikan.

---

<sup>60</sup> World Bank, "Memulihkan Daya Saing". Dalam [http:// www.inweb18.worldbank.org/749d7](http://www.inweb18.worldbank.org/749d7), Diakses tanggal 25 Mei 2008, pukul 20.35.